

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi industri 4.0 tidak bisa dihindari di era revolusi industri keempat saat ini, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan tersebut meliputi globalisasi, persaingan internasional, kemajuan teknologi, migrasi, perubahan masyarakat, masalah lingkungan, dan politik internasional. Individu dalam masyarakat kontemporer mengalami tekanan besar dari rangsangan visual yang ditransmisikan melalui beragam platform komunikasi dan media, yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi dan membentuk beberapa aspek kehidupan mereka. Dunia pendidikan pasti terkena dampak kuatnya revolusi industri keempat, tugas sekolah adalah membina manusia yang siap menghadapi era digital. Mason (2006) menegaskan bahwa untuk dapat berkembang di era revolusi industri keempat, abad ke-21, dan era digital, siswa harus memadukan keterampilan dan pengetahuan. penyedia pendidikan menghadapi kebutuhan yang kuat akan pendidikan luar biasa untuk mempersiapkan generasi Z, yaitu individu yang lahir antara tahun 1997 dan 2000an.

Kualitas pendidikan bergantung pada banyak hal, aspek-aspek tersebut merupakan komponen dinamis yang hidup berdampingan di dalam sekolah dan lingkungannya sebagai suatu sistem yang terpadu. Salah satu variabel yang berkontribusi adalah guru, dan guru memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Guru harus memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memfasilitasi

proses pembelajaran secara efektif karena kualitas proses pembelajaran bergantung pada adanya perencanaan pembelajaran yang efektif.

Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 (2003:2), pendidikan adalah usaha yang bertujuan dan terstruktur yang bertujuan untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif yang memberdayakan siswa untuk secara aktif mengembangkan kemampuan yang melekat pada dirinya, namun tidak terbatas pada moral, kearifan beragama, kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan yang penting bagi kesejahteraan diri sendiri, masyarakat, dan bangsa serta negara.

Menurut sistem pendidikan nasional Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 (2003:5), tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan keterampilan dan menumbuhkan nilai-nilai serta budaya bangsa yang dihormati, dengan tujuan mencerdaskan warga negara dan mengembangkan potensi manusia. Siswa menjadi individu yang beriman dan hormat kepada tuhan, kuat, terhormat, kokoh, berpengetahuan luas, kompeten, inovatif, mandiri, dan warga negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan aspek penting dan tidak terpisahkan dari keberadaan manusia. Pendidikan memfasilitasi transfer pengetahuan, nilai-nilai, dan standar sosial dari generasi tua ke generasi muda.

Tujuan pendidikan di Indonesia adalah menumbuhkan rasa pengabdian yang tak tergoyahkan di kalangan peserta didik untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan berkualitas tinggi akan menumbuhkan individu dengan keterampilan yang luar biasa dan mandiri, adapun upaya peningkatan mutu

pendidikan terus dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan individu yang mempunyai informasi dan sikap yang handal dan selaras dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Pengajaran pendidikan kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar telah dimasukkan ke dalam kurikulum hingga Universitas.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berperan penting dalam menjamin kemajuan dan kelangsungan pemerintahan Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Hal ini menekankan perlunya pendidikan yang mampu secara efektif mendukung pertumbuhan dan eksistensi bangsa Indonesia. Dalam mengajarkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, guru harus fokus pada dua aspek: penanaman nilai-nilai moral pada anak melalui lima prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, dan pemberian materi akademik yang relevan dengan kurikulum Sekolah kepada siswa.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk individu yang patut diteladani dan berakal budi. Individu dianggap memiliki kecerdasan ketika mereka menunjukkan kompetensi sipil, kompetensi mengacu pada kumpulan aktivitas cerdas yang berwenang untuk membangun rasa tugas yang harus dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas secara kompeten dalam bidang tertentu. Gagasan tentang kompetensi pendidikan kewarganegaraan mencakup tiga aspek utama: pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan disposisi kewarganegaraan.

Tiga sila pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah sebagai berikut: pengembangan kecerdasan kewarganegaraan; peningkatan tugas-

tugas sipil; dan dorongan keterlibatan masyarakat. Prinsip-prinsip pendidikan kewarganegaraan yang baik kewarganegaraan, kompetensi kewarganegaraan, dan pengetahuan kewarganegaraan, sejalan dengan ketiga kemampuan kewarganegaraan tersebut dan bersifat pribadi (watak sipil).

Cholisin (2005:3) mengemukakan bahwa keterampilan kewarganegaraan sebagai keterampilan yang bersumber dari pengetahuan kewarganegaraan. Keterampilan ini meningkatkan pentingnya informasi yang diperoleh dengan memungkinkan individu untuk secara efektif mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan urusan nasional dan negara. Keterampilan kewarganegaraan mencakup kemampuan kognitif dan keterlibatan aktif dalam masyarakat, kemampuan kognitif yang penting untuk menumbuhkan individu yang berpikiran terbuka, efisien, dan akuntabel yang mencakup kemampuan mencakup kemampuan mengenali, mengartikulasikan, sudut pandang yang berkaitan dengan permasalahan publik.

Pengetahuan kewarganegaraan juga dikenal sebagai pengetahuan keterampilan, pemahaman penting yang harus diperoleh masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat demokratis. Informasi ini memberdayakan individu untuk menggunakan hak dan memenuhi kewajibannya dalam keterlibatan politik. Keterampilan kewarganegaraan mencakup kemampuan kognitif dan keterlibatan aktif dalam masyarakat. Keterampilan kewarganegaraan ini melibatkan penerapan informasi yang ada dengan cara yang memberikan arti penting. secara praktis, keterampilan kewarganegaraan mencakup kemampuan berpikir kritis ketika mengambil keputusan dan secara aktif terlibat dalam keterlibatan politik yang bertanggung jawab.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2016) tentang pengaruh pendekatan *Project Based Learning* terhadap hasil belajar, ditemukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di kelas IV SD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar. Peneliti juga bermaksud untuk memastikan bagaimana paradigma pembelajaran berbasis proyek dan tantangan etika berdampak pada penanaman kompetensi pedagogik kewarganegaraan dalam lingkungan pendidikan. Dengan menggunakan Tema 6 Subtema 1, peneliti berharap menemukan bahwa kompetensi kewarganegaraan mempunyai dampak yang signifikan terhadap temuan V SD.

Hasil observasi awal peneliti terhadap siswa kelas V SD Negeri 106156 Klumpang di kecamatan Hampan Perak kabupaten Deli Serdang pada bulan Mei diketahui bahwa kemampuan siswa dalam keterampilan kewarganegaraan kurang memadai. Di lapangan ditemukan bahwa, keterampilan kewarganegaraan siswa dianggap kurang memadai karena ketidakmampuan mereka mengidentifikasi peristiwa yang berkaitan dengan materi yang disampaikan guru, akibatnya siswa menghadapi tantangan dalam membedakan kekuatan dan kelemahan isu berdasarkan peristiwa tersebut. Selain itu, siswa menunjukkan kemahiran yang terbatas dalam memanfaatkan beragam televisi, dan media elektronik. memanfaatkan ponsel untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan teman sebaya mengenai suatu peristiwa dapat menghambat munculnya sudut pandang baru.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, terlihat dari sisi Sekolah terdapat kekurangan dalam keterampilan kewarganegaraan siswa. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurang optimalnya pemanfaatan metode pengajaran oleh guru,

yang sebagian besar mengandalkan pengajaran langsung melalui ceramah. Pendekatan ini menciptakan lingkungan belajar yang monoton dan akibatnya menghambat kemampuan berpikir kreatif siswa. Terbatasnya kapasitas siswa dalam berpikir kreatif menghambat kemampuannya dalam memahami dan menangkap materi yang ditawarkan. Siswa tidak diinstruksikan dalam pengembangan kemampuan mereka untuk mengartikulasikan sudut pandang mereka. Selama keseluruhan proses pendidikan, 80% guru menerapkan gaya ceramah tanya jawab, sedangkan 20% sisanya menginstruksikan siswa untuk belajar secara mandiri atau berkelompok.

Salah satu masalah tambahan yang berkontribusi terhadap kurangnya kemampuan kewarganegaraan siswa adalah kurangnya sumber daya pengajaran yang memadai, seperti proyektor LCD. SD Negeri 106156 Klumpang hanya memiliki satu proyektor LCD, sehingga membatasi ketersediaan teknologi ini untuk keperluan pembelajaran di ruang kelas tertentu. Mengingat kejadian tersebut di atas, maka perlu dikembangkan model pembelajaran yang memperhatikan aspek integrasi guna meningkatkan kemampuan kognitif dan keterlibatan siswa. Metodologi pembelajaran ini merupakan hal baru dan berpotensi meningkatkan mendorong pengembangan kemampuan kewarganegaraan mereka.

Di sekolah dasar tujuan mengajarkan pengetahuan kewarganegaraan kepada siswa lebih dari sekadar membiasakan mereka dengan tanggung jawab dan hak istimewa warga negara, tujuannya di sini adalah untuk menumbuhkan kemampuan kewarganegaraan, seperti keterampilan partisipasi, pada siswa. Baik dalam konteks nasional maupun negara bagian, individu dapat menunjukkan keterlibatan aktif

dengan mengungkapkan pendapat mereka dengan cara yang penuh hormat di dalam kelas, membina hubungan positif dengan teman sebaya dan guru, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan sekolah dan ekstrakurikuler (Hulu dan Bawamenewi, 2022: 264-265).

Penelitian yang dilakukan oleh Murdiono (2010) menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah meningkatkan keterampilan kewarganegaraan dan mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan ini secara efektif memfasilitasi proses belajar mengajar, yang mengarah pada peningkatan hasil siswa. Tingkat keterampilan kewarganegaraan siswa dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan mereka dalam menganalisis tantangan yang telah dikenali oleh kelompoknya masing-masing.

Selain berfokus pada taktik pembelajaran berbasis masalah, metode diskusi yang merangsang permasalahan moral merupakan pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan, yang meliputi penanaman nilai dan moral. Menurut Moedjiono dan Dimiyati (1992:7), pendekatan diskusi dilema moral melibatkan sekelompok individu yang terlibat dalam percakapan kolektif di mana mereka bertukar perspektif mengenai topik atau masalah tertentu. Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan solusi suatu masalah dengan mempertimbangkan semua data yang relevan.

Dilema moral dikenal luas sebagai strategi pengajaran yang sangat efektif untuk memperoleh kemampuan sulit seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komentar pribadi. Mempromosikan pertukaran ide, informasi, dan pendapat di kalangan siswa untuk meningkatkan iklim belajar yang dinamis. Sebagaimana

dikemukakan oleh Balakrishnan (2007: 105), dilema moral adalah situasi di mana seseorang dihadapkan pada satu masalah dan kualitas tertentu yang memaksanya untuk mengatasi masalah tersebut dan mengambil pilihan. Dilema moral dapat diartikan sebagai situasi yang menghadirkan pilihan atau keputusan terkait dengan suatu masalah etika.

Fathurrohman (2019:80-81) menegaskan bahwa pendidikan moral merupakan strategi yang menonjol dalam kerangka pendidikan nilai yang lebih luas dan komprehensif. Pendidikan moral mencakup perolehan pengetahuan, sikap, keyakinan, dan kemampuan yang diperlukan untuk mengelola konflik secara efektif dan menunjukkan kualitas baik seperti kejujuran dan kasih sayang. tujuan utama pendidikan moral adalah untuk membina pribadi-pribadi yang memiliki otonomi, memahami prinsip-prinsip moral, dan menunjukkan dedikasi yang teguh untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Fatma (dalam Sumantri, 2006:53) menyatakan bahwa tahap perkembangan siswa sekolah dasar berkaitan dengan pembentukan kepribadian yang kohesif. anak-anak yang berusia antara 6 dan 11 tahun dianggap berada pada fase masa kanak-kanak pertengahan. Selama usia pertengahan masa kanak-kanak, anak-anak memperoleh keterampilan dasar dalam berhitung, membaca, dan menulis. Tahapan tumbuh kembang anak sekolah dasar dapat diamati melalui berbagai komponen kunci kepribadian anak, yaitu: 1) perkembangan fisik-motorik, 2) perkembangan kognitif, 3) perkembangan sosio-emosional, 4) perkembangan linguistik, dan 5) keagamaan dan perkembangan moral.

Menurut Azmi (2023:6) guru mempunyai peranan penting dalam kemajuan pendidikan, khususnya dalam menumbuhkan nilai-nilai etika peserta didik. Sebagai pendidik dan pelatih, guru mempunyai kewajiban moral untuk tidak hanya mendidik siswa secara intelektual, namun juga membantu membentuk mereka menjadi manusia yang lebih baik. Untuk menumbuhkan akhlak peserta didik, seorang pendidik harus mempunyai kemampuan berkomunikasi secara efektif dan menanamkan prinsip-prinsip moral dalam diri peserta didik.

Arfani (2016:97) mengemukakan bahwa sikap dan perilaku moral dapat diperoleh melalui berbagai metode: memperoleh pengetahuan dengan melakukan eksperimen dan pengalaman praktis, anak-anak berusaha untuk memperoleh pengetahuan tentang apakah perilaku mereka sejalan dengan norma-norma masyarakat dan mendapatkan penerimaan sosial. Jika anak pada awalnya tidak berhasil, mereka dapat terus mencoba hingga akhirnya mereka menunjukkan perilaku yang diinginkan secara kebetulan. Pendidikan langsung melibatkan pengajaran anak-anak untuk merespons dengan tepat dalam situasi tertentu dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh keluarga, sekolah, dan komunitas. Selain itu anak-anak cenderung meniru orang yang mereka kagumi, strategi ini biasanya dijalankan secara tidak sadar dan tanpa pengaruh eksternal. Aspek krusialnya adalah hadirnya role model yang perilakunya dinilai patut ditiru.

Hulu & Bawamenewi (2022:265) mengemukakan bahwa teknik pembelajaran yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan kewarganegaraan adalah pembelajaran kewarganegaraan berbasis masalah atau penugasan portofolio. Perolehan *civic skills* atau keterampilan kewarganegaraan melalui penerapan strategi

pembelajaran portofolio meliputi keterampilan partisipasi dan kemampuan intelektual. Kemahiran guru dalam menemukan cara yang cocok untuk melaksanakan, tanggung jawab mencakup penyampaian pengetahuan tetapi juga membina siswa menjadi individu yang bertanggung jawab yang secara aktif terlibat dan menunjukkan kepedulian terhadap berbagai masalah yang muncul di lingkungan sekitar mereka. Sikap seorang pendidik tentang cara terbaik untuk menanamkan kebajikan sipil pada siswanya harus menginformasikan keputusan pedagogis mereka.

Menurut Murdiono dkk. (2023:12) cara yang baik untuk mengajarkan kewarganegaraan adalah melalui penggunaan portofolio untuk meningkatkan kemampuan kewarganegaraan. Istilah "portofolio" berasal dari bidang seni dan biasanya mengacu pada koleksi kurasi yang mewakili karya seniman. Seniman biasanya mengumpulkan karya seninya untuk tujuan tertentu, seperti menyelenggarakan pertunjukan seni keliling. Seniman terkadang memamerkan karya seni yang telah mereka kumpulkan, biasanya memilih untuk menampilkan karya terbaik mereka.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khofifaturrahmah dkk. (2022) ditemukan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Sebab pendekatan pembelajaran ini menuntut pemahaman dan penghayatan siswa terhadap tugas, hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Selama proses pendidikan guru juga membimbing siswa dalam mengidentifikasi tindakan yang tepat ketika mereka menghadapi kesulitan terkait dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka sebagai anak, siswa, dan anggota masyarakat. Pendekatan

pembelajaran berbasis proyek ini menuntut siswa untuk terlibat aktif dalam berbagai bentuk ekspresi, seperti tulisan, seni, foto, video, atau presentasi yang sebelumnya telah dibahas oleh teman-temannya. Individu harus mengembangkan, menciptakan, menentukan, melaksanakan, dan menilai topik “Panas dan Pergerakannya”.

Penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan membandingkan keterampilan kewarganegaraan siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dengan yang diajar menggunakan model pembelajaran yang menilai langsung dilema moral. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Model *Project Based Learning* dan Dilema Moral terhadap Keterampilan Kewarganegaraan di Kelas V SD UPT SPF SDN 106156 Klumpang.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks yang diberikan, maka dapat disimpulkan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Pemanfaatan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang kurang optimal menyebabkan siswa mengalami kebosanan, kepasifan, dan tantangan dalam pembelajaran PPKn.
2. Penekanan dalam pendidikan kewarganegaraan sering kali lebih pada perolehan pengetahuan siswa dibandingkan pengembangan kemampuan kewarganegaraannya.
3. Guru yang tidak memiliki kreativitas dan inovasi dalam metode pengajarannya sering kali mengalami kebosanan dan kepasifan.
4. Siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

5. Pendidik tertentu masih tidak aktif memanfaatkan fasilitas pendukung pembelajaran.
6. Metode pembelajaran tradisional masih digunakan.
7. Kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran
8. Kehadiran isu-isu moral dalam pembelajaran PKn masih terbatas sebagai konsekuensi dari kurangnya fokus guru, sehingga menyebabkan berkurangnya kapasitas untuk mengenali dan mengartikulasikan perspektif baru.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dan Identifikasi masalah tersebut terlihat bahwa ada beberapa masalah yang muncul dan dapat diteliti namun sangat luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembatasan masalah agar masalah yang akan diteliti lebih fokus dan terarah, maka penelitian dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan pada muatan Pembelajaran PPKn siswa kelas V SD Negeri 106156 Klumpang
2. Model pembelajaran yang digunakan adalah model *project based learning*.
3. Pengalaman Dilema moral siswa adalah yang diperoleh melalui kegiatan *brain storming* yang dilakukan oleh guru.
4. Materi Pokok yang dibahas Tema 6 subtema 1 adalah Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab
5. Penelitian dilakukan pada kelas V semester 2 di SD UPT SPF SD Negeri 106156 Klumpang

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan Masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah keterampilan kewarganegaraan siswa yang diajarkan dengan *Project based learning* lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran langsung ?
2. Apakah keterampilan kewarganegaraan siswa yang memiliki dilema moral tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan memiliki dilema moral rendah ?
3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran *project based learning* dan dilema moral dalam mempengaruhi keterampilan kewarganegaraan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan keterampilan kewarganegaraan siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran *project based learning* dibandingkan dengan model pembelajaran langsung.
2. Untuk mengetahui perbedaan keterampilan kewarganegaraan siswa yang memiliki dilema moral tinggi dibandingkan dengan yang memiliki dilema moral rendah.
3. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran *project based learning* dan dilema moral terhadap keterampilan kewarganegaraan.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi untuk menunjang peningkatan hasil belajar siswa dengan rincian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tentang pengaruh model pembelajaran *project based learning* dan dilema moral terhadap keterampilan kewarganegaraan di Kelas V UPT SPF SD Negeri 106156 Klumpang ini mempercayai khasanah penelitian dalam dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa.

Memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran dan mempermudah siswa dalam mengingat materi pembelajaran yang diberikan guru sehingga keterampilan kewarganegaraan siswa meningkat.

b. Bagi Guru

Memberikan ide kreatif terhadap guru tentang model pembelajaran *project based learning* dan memotivasi guru agar menggunakan model pembelajaran yang variatif aktif, dan menarik dengan menggunakan model pembelajaran *project based learning* penjelasan diskusi yang menumbuhkan dilema moral.

c. Bagi Sekolah

Memberikan kontribusi untuk sekolah agar dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik dan meningkatkan sumber daya yang ada.

d. Bagi Institusi dan instansi terkait

Menjadi bahan masukan dalam membina meningkatkan kualitas pengajar/pendidik guna menunjang pelaksanaan pembelajaran di sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.



THE
Character Building
UNIVERSITY